PERKEMBANGAN DAN KEMUNDURAN PERDAGANGAN LADA DI ACEH ABAD 19

Lailatusysyukriyah
Hartutik
Prodi Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Samudra
lailatusysyukriyah@yahoo.co.id

Abstract

Indonesia archipelago is well known by the spice production and maritime trade for many times. The best product of spice from western Indonesia archipelago is pepper that produced from the coastal line of Aceh. There were many ports that connecting international pepper trade. The purpose of research is enriched the historiography study of international spice commerce in Indonesia on the last century that connected by shipping. Spice shipping transportation system is pointing out the great expansion of maritime trade in ancient Indonesia archipelago. History methods of the research are divided by four process, heuristic, sources critics, interpretation, and historiography. The development pepper trade in Aceh on 19th century is simultaneously with the rise of international commerce in the first half 19th marked by expansion of the new networks, the flourishing of pepper production, and connection between Aceh and British Malayan in Penang. The decline pepper trade in Aceh on the last of 19th century is caused by the changing of market demand to the article that discharging of the value. Dutch expansion and military blockade in some pepper ports in Aceh, also influence on the process of decline.

Key Word: *The Development, Decline, Pepper Trade, Aceh, 19th*

I. PENDAHULUAN

Perdagangan lada Aceh pada paruh pertama abad 19 menunjukkan masih kuatnya tradisi bahari di sepanjang pantai barat dan pantai timur Sumatra yang menjadi simbol kedaulatan wilayah perairan Nusantara selama berabad-abad. Perkembangan perdagangan Lada di Aceh Abad 19 menitikberatkan pada sejarah perkembangan komoditas rempah-rempah utama yang menjadikan kepulauan Nusantara dikenal sebagai pusat pelabuhan dagang internasional hingga kurun waktu berabad-abad. Kejayaan Aceh sepanjang abad 16 hingga paruh pertama abad ke-17 tidak dapat dipisahkan dari peranan perdagangan lada yang menopang kekuatan ekonomi Kerajaan Aceh. Kebangkitan kembali perdagangan lada dalam skala internasional dimulai kembali pada paruh pertama abad ke-19 dengan perluasan jaringan-jaringan perdagangan baru, berkembangnya wilayah-wilayah penghasil lada dan meningkatnya hubungan dagang dengan Penang.

Perkembangan tersebut tidak berlangsung lama, karena mulai paruh kedua abad 19, permintaan pasaran dunia terhadap komoditas lada tidak lagi sebesar tahun-tahun sebelumnya. Abad 19 sebagaimana di ungkapkan oleh banyak pengamat dan sejarawan, adalah kurun masa yang semakin menandai kemerosotan ekonomi perdagangan laut Aceh. Pada kurun waktu inilah Aceh juga dihadapkan pada masa-masa tersulit yang mempengaruhi masa

depan perdagangan ladanya, terutama hingga paruh terakhir abad 19. Penelitian ini berusaha mengungkapkan bagaimana perdagangan lada sebagai komoditas ekspor andalan bagi Aceh selama beberapa abad, mengalami fase perkembangan hingga kemundurannya hingga kurun masa tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sistem produksi dan distribusi wilayah-wilayah penghasil lada di Aceh pada abad ke-19, menguraikan jaringan perdagangan lada antara Aceh dengan wilayah-wilayah luar selama abad ke-19, dan memahami eksistensi lada sebagai komoditas ekspor bagi Aceh hingga penghujung abad ke-19.

II. KAJIAN LITERATUR

Sejarah ekonomi Aceh seringkali dikaitkan dan menjadi satu paket dengan kajian sejarah sosial atau sejarah politik. Berikut ini akan di jabarkan beberapa kajian sejarah yang banyak memuat tentang sejarah perdagangan di Aceh, khususnya pada abad ke-19.

Salah satu literatur penting dalam penelitian ini adalah sebuah laporan yang ditulis oleh seorang pegawai sipil EIC pada tahun 1840, bernama John Anderson yang bertugas menjadi duta Inggris di Penang, Singapura, dan Malaka.[1] John Anderson dalam misinya mencari wilayah-wilayah dagang di pantai timur Sumatra untuk kepentingan pemerintah Inggris, berusaha kembali memperbaharui hubungan dagang dengan wilayah Aceh yang sempat mengalami pasang surut. Aceh di pandang sebagai kerajaan merdeka dengan letaknya yang sangat strategis berseberangan dengan semenanjung Malaya, di pandang memiliki arti penting bagi pendirian kantor dagang Inggris di wilayah tersebut. Hubungan antara pemerintah Inggris di Penang dengan Aceh dimaksudkan untuk menunjukkan politik legitimasi Inggris terhadap penduduk pribumi dan memperluas jaringan perdagangan Inggris terutama di wilayah-wilayah pantai Sumatra. Laporan John Anderson dalam melaksanakan misinya di Aceh lebih banyak menguraikan permasalahan politik untuk memperoleh kesepakatan dagang dengan pemerintah lokal. Meskipun demikian pada akhir laporannya ia menguraikan keadaan pantai-pantai di Sumatra, perdagangan di Aceh, pelabuhan-pelabuhan di pantai barat dan utara pulau Sumatra, dan hubungan perdagangan pemerintah Inggris di Selat Malaka dengan wilayah-wilayah di sepanjang pantai timur Sumatra dari Teluk Permata hingga Siak. Dalam bagan lampirannya, John Anderson juga memaparkan secara terperinci dalam bentuk data statistic mengenai nilai perdagangan ekspor dari Aceh, yang meliputi wilayah-wilayah Samalanga, Meuredeu, Peusangan, Lhokseumawe, Pasai, Pulau Rayah hingga Trumon, Tapus, Barus, dan Singkil. Dalam bentuk tabel juga diuraikan nilai barang-barang ekspor yang dikirim ke Penang dari Aceh dan pantai Pidie antara tahun 1810-1811 hingga 1823-1824, jumlah produksi sirih yang diekspor ke Penang tahun 1819-1820 hingga 1823-1824 untuk pasaran Madras, Kalkuta, Bombay, China, Siam, dan Pegu lengkap dengan daftar muatan impor dan ekspor dengan perahu-perahu Aceh.

Tinjauan pustaka selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebuah tesis yang mengemukakan

[1] John Anderson, *Acheen and The Ports on the North and East Coast of Sumatra with Incidental Notices Trade in the Eastern Seas and the Aggression of the Dutch*, (London: W.M. H. Allen and CO, Leadenhall Street, 1840)

hubungan perdagangan antara Aceh dan Inggris pada awal abad ke-19, ditulis oleh Lee Kam Hing berjudul *The Sultanate of Aceh Relationship with the British 1760-1824*. Aceh menjadi pintu masuk bagi Inggris yang ingin menanamkan kepentingannya di Sumatera sejak awal abad ke-17. Hubungan antara Aceh dan Inggris tersebut sempat mengalami pasang surut dan diperbaharui kembali hingga mencapai puncaknya pada paruh pertama abad ke-19. Periode singkat dari hubungan kerajaan Aceh dan pemerintah Inggris tersebut memberikan beberapa pengaruh signifikan bagi kedua belah pihak dan lebih penting daripada yang pernah disadari.[2] Lee Kam Hing adalah satu diantara kalangan akademisi yang menempatkan pentingnya hubungan Aceh dan Inggris dalam sejarah diplomatik Aceh abad 18 dan 19.

Arti penting peristiwa yang terjadi sepanjang kurun waktu akhir abad ke-18 bagi *East India Company* (EIC) atau Perusahaan Dagang Inggris untuk Wilayah-wilayah Hindia Timur ditandai dengan meluasnya pengaruh politik-ekonomi kawasan Selat Malaka. Hal tersebut di mulai dengan pencarian pusat penyaluran barang-barang dagangan dan stasiun pelengkap untuk mengembangkan perdagangan dengan Cina. Dalam proses pencarian tersebut, Aceh dianggap sebagai tempat yang cocok untuk tujuan tersebut karena letaknya yang strategis. Dengan pelabuhannya yang besar, Aceh menawarkan kelengkapan pelabuhan yang memiliki nilai strategis secara ekonomi dan militer. Aceh juga sangat penting nilainya di bidang komersial perdagangan karena wilayah tersebut menyediakan komoditas-komoditas dagang yang memenuhi standar permintaan bagi pasar India dan Cina.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah (*historical method*). Metode sejarah adalah seperangkat prinsip dan aturan sistematis yang dibentuk untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan menyajikan hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis.[3] Langkah pertama adalah mengumpulkan sumber (*heuristic*). Sumber-sumber primer atau sejaman berupa dokumen atau arsip yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, Museum Aceh, dan Perpustakaan digital www.acehbooks.org. Dokumen sebagai bahan klasik untuk menyelidiki perkembangan historis yang khusus biasanya digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan tentang apa, kapan, dan dimana. Jawaban yang tersusun sebagai suatu konfigurasi unik memuat faktor-faktor yang dinyatakan secara deskriptif.[4] Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen resmi dari pemerintah dan memoirs atau catatan perjalanan pejabat-pejabat pemerintah dengan sumber-sumber sejaman. Sumber sekunder yang

[2] Lee Kam Hing, *The Sultanate of Aceh Relationship with the British 1760-1824* (Thesis). (Kuala Lumpur: Oxford University Press, Singapore, Oxford, New York. KITLV, 1995)

[3] Gilbert J. Garaghan S, *A Guide to Historical Method*, (New York: Fordham University Press, 1957), hlm. 33

[4] Sartono Kartodirjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif* (Jakarta: PT Gramedia, 1982), hlm. 100

digunakan dalam penelitian ini terdiri atas buku-buku dan jurnal ilmiah baik dalam bahasa asing maupun bahasa Indonesia. Langkah kedua adalah kritik sumber, berupa kritik intern dan kritik ekstern. Kritik sumber adalah tahap penilaian terhadap sumber yang otentik dan kredibel. Otentik berarti bahwa sumber itu benar-benar dikeluarkan oleh orang atau organisasi yang namanya tertera dalam sumber itu, sedangkan kredibel berarti seberapa jauh informasi yang terkandung didalamnya dapat dipercaya.[5] Langkah ketiga adalah proses perumusan fakta-fakta dari sumber berupa bukti dan bekas yang diperoleh dari tahap *heuristic* (pencarian sumber). Proses perumusan fakta ini dihasilkan dengan membandingkan berbagai sumber dalam penulisan sejarah (interpretasi). Tahap terakhir adalah historiografi yaitu penulisan sejarah secara sistematis dan konseptual setelah melewati ketiga tahapan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebangkitan kembali aktifitas perdagangan lada di Aceh telah dimulai sejak akhir abad ke-18. Wilayah-wilayah penghasil lada dihasilkan disepanjang pantai barat dan pantai timur Sumatra yang merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh. Batubara, Langkat, Pidie, dan pantai-pantai di sepanjang Teluk Permata hingga Aceh adalah wilayah-wilayah penghasil utama produk rempah-rempah bernilai tinggi dengan ekspor tahunan senilai 400.000 – 500.000 dollar Spanyol lada dan sirih.[6] Pelabuhan-pelabuhan di Aceh memperoleh produksi lada dari pantai timur dan pantai barat Sumatra.

Nama pelabuhan-pelabuhan di pantai barat Sumatra yang dimiliki Aceh adalah: Tapus, Sebadi, Pulo Dua, Kalawat, Telapau, Muki Utara dan Selatan, Labuhan Haji, Manghin, Simeuleu, Tarepuli, Taddow, Tarang, Senangkan, Annabalu, Pulau Rayah. Pelabuhan-pelabuhan tersebut merupakan distrik/wilayah bagian kaya yang menghasilkan lada dalam jumlah besar, benzoin, dan kapur barus. Kemudian Singkil, Ayam Dammah, Trumon, Rambong, Saluhat, Susoh, Kuala Batu, Barus, Tapaktuan, dan Sama Dua. Pelabuhan-pelabuhan dan tempat-tempat di pantai utara, dimulai dari bagian barat, adalah: Aceh, Perdada, Lawang, Pidie atau pantai Sirih, Pakan, Selu, Burong, Sarong, Meuredeu, Samalanga, Peusangan, Jangka, Lhokseumawe, Chunda, Pasai, dan Keureuteu.[7] Perdagangan dalam skala luas dilakukan di Aceh dan wilayah kekuasaannya dipantai barat dan beberapa wilayah sebelah utara di pantai timur Sumatra, disamping bagian-bagian dari perdagangan secara umum dari pantai barat, yang telah dinikmati Pinang selama beberapa tahun. Di wilayah tersebut selama periode yang panjang, telah berlangsung penetrasi perdagangan langsung antara beberapa pelabuhan

[5] Homer Carrey Hockett, *The Critical Method in Historical Research and Writing* (New York: The Mac Millan Company, 1967), hlm. 9

[6] *A Brief Account of the Several Countries Surrounding Prince of Wales's Island with their Production Reed from Captain Leight: Enclosed Lord Cornwallis's letter to Mr. Dundas 7th January 1789* (Journal of Malayan Branch Royal Asiatic Society, Vol. 16, No. 1, July 1938)

[7] *Op.cit*, John Anderson, hlm. 160

dengan Benggala, Madras, Bombay, dan baru-baru ini dengan Singapura dan Malaka.[8] Beberapa pedagang bebas melabuhkan muatan mereka di pantai-pantai tersebut selama Aceh masih menduduki posisi sentral sebagai pusat perdagangan di Selat Malaka.

1. Perkembangan Perdagangan Lada Paruh Pertama dan Kedua Abad 19

Sejak tahun 1800 kebun-kebun lada di Palembang, Jambi, Jawa Barat dan Sumatra Selatan secara keseluruhan sudah tidak produkstif lagi, tetapi kebun-kebun baru telah mulai tumbuh di wilayah bagian utara Sumatra yang terletak di Aceh, pantai selatan Meulaboh, pantai timur Sumatra dan Penang.[9] Wilayah penghasil paling penting di pantai barat Sumatra dan pantai timurnya adalah tempat-tempat paling cocok untuk budidaya lada, terutama di Aceh, Tiku, Bengkulu, Padang dan Lampung.[10] Lada terbaik tidak tumbuh diwilayah-wilayah paling subur, karena lada dari Jawa dan Palembang kualitasnya paling buruk di kepulauan Hindia, dibandingkan dengan lada dari Penang dan pantai barat Sumatra dengan kualitas terbaik. Pembudidayaan lada dengan pemeliharaan yang tepat dapat meningkatkan kualitasnya, sebagaimana halnya dengan komoditas lain, dan untuk alasan ini lada di pasaran Penang lebih dihargai daripada lada yang terdapat di kepulauan Hindia.

Selama kurun waktu paruh pertama abad ke-19, di Susoh dan Singkil, Aceh terdapat dua pelabuhan yang meluaskan jaringan perdangannya dengan kapal-kapal asing. Dua pelabuhan tersebut dikontrol oleh Lebai Dappah, seorang pengusaha lokal asal Singkil yang menggalakkan penanaman lada kepada penduduk pribumi di Aceh. Singkil adalah pelabuhan yang sibuk meskipun tidak banyak lada yang dihasilkan dari sana, sedangkan Susoh memproduksi sejumlah besar lada meskipun aktivitas pelayaran di wilayah tersebut relatif berbahaya pada tahun-tahun sebelumnya.[11] Lebai Dappah menggunakan Singkil sebagai basis perdagangannya dan menempatkan anak laki-lakinya di Susoh. Ia selalu mencari wilayah penghasil lada baru dan mendorong penduduk Aceh untuk mendiami wilayah-wilayah yang kurang berkembang. Pada saat memperoleh kontrol pada wilayah yang baru, ia menempatkan anggota keluarganya untuk memimpin wilayah tersebut. Sebagai hasilnya, beberapa pelabuhan lain berada dibawah kontrol keluarga Lebai Dappah, seperti Air Dammah, Trumon, Rhambong, Saluhat, dan Kuala Baru. Perkembangan Susoh dan Singkil di bawah pengaruh Lebai Dappah membentuk jaringan migrasi disepanjang pantai barat Sumatra. Gelombang migrasi tersebut disebabkan oleh faktor tingginya harga lada, serta beratnya beban pajak dan harga rendah yang dibayarkan oleh para *Uleebalang* dan Sultan terhadap komoditas lada. Migrasi penduduk Aceh tersebut tersebar hingga Barus, Sorkam, Air Bangis dan Padang bagian Selatan. Sorkam dan Air Bangis

[8] Ibid.

[9] Anthony Reid, *Humans and Forest in Pre-Colonial Southeast Asia* (Environment and History Vol. I No. I, February 1995, Published by: White Horse Press) hlm. 100

[10] John Crawfurd, *History of the Indian Archipelago Vol III* (London: Printed for Archibald Constable aand Co. Edindburg and Hurst, Robinson, and Co. Cheapside, 1820) hlm. 358-359

[11] *Op.cit*, Lee Kam Hing, hlm. 97

merupakan distrik yang kaya lada dan mensuplai kebutuhan lada di Tapanuli dan Natal.[12]

Pembentukan pemerintah Inggris di Penang memiliki nilai penting bagi peningkatan aktifitas perdagangan dengan pelabuhan-pelabuhan bagian utara Sumatra dimana pembudidayaan lada telah lama berkembang serta menjalin hubungan kerjasama dengan para kepala adat di wilayah-wilayah tersebut yang dapat menguntungkan Kompeni.[13] Kedudukan Penang melengkapi pos-pos dagang Inggris di wilayah-wilayah Hindia Timur dalam pelayaran menuju Cina sehingga tidak perlu tergantung kepada Belanda yang menguasai pelabuhan-pelabuhan di wilayah Timur. Penang diharapkan dapat menghentikan perkembangan kekuatan Belanda di Semenanjung Malaya, yang akan mengontrol rute-rute perdagangan laut ke Cina dan sekitarnya. Kompeni Inggris untuk wilayah Hindia Timur akan menjamin persediaan rempah-rempah di kepulauan Nusantara, yang nantinya akan dimonopoli oleh Belanda, khususnya setelah tahun 1784. Penang dengan posisinya yang strategis dapat mempermudah ekspansi Inggris di Sumatra dan kepulauan Nusantara. Pos dagang Inggris di Bengkulu yang terus menerus mengalami kerugian dalam perdagangan lada, tidak mampu menanggung beban operasional baik sispil maupun militer dalam menghadapi kompetisi dengan Prancis dan Amerika. Pertimbangan lain pendirian basis Inggris di Aceh didasarkan pada keyakinan bahwa presidensi Inggris di Bengkulu dan pantai barat Sumatra akan jatuh ketangan Belanda selama perang, disamping meningkatkan sumber alternatif bagi pasokan lada untuk Inggris.[14] Pada tahun 1819 Aceh terikat perjanjian dengan Inggris yang menandai dimulainya kembali perkembangan perdagangan lada di wilayah tersebut.

Konsumsi lada di seluruh dunia meningkat secara tajam pada kisaran awal abad ke-19 seiring dengan meluasnya ekspansi dagang Inggris dan bangsa-bangsa Eropa lain ke wilayah-wilayah penghasil lada di kepulauan Nusantara. Sejak kurun masa tersebut persebaran lada mencakup wilayah-wilayah Asia dan Timur Jauh, Eropa, hingga Amerika. Peningkatan tersebut diimbangi dengan harga dasar lada dan upah buruh di kepulauan Nusantara yang juga meningkat. Politik Inggris di Aceh khususnya di bidang perdagangan sangat memainkan peranan penting dalam perkembangan pemasaran lada. Sejak permulaan berdirinya perusahaan dagang *Inggris East India Company*, Aceh menjadi salah satu wilayah penting yang mensuplai kebutuhan lada di kepulauan Nusantara setelah selama abad ke 18 Inggris sangat tergantung pada pasokan lada dari Bengkulu. Pendirian pos dagang Inggris di Penang telah mempertahankan perdagangan Inggris dengan Aceh dan lada menjadi komoditas impor utama bagi Inggris. Pada tahun 1810-1811 sejumlah 3,323 pikul lada telah diperoleh Penang dari Aceh dan pada tahun 1813-1814 impor lada dari Aceh ke Inggris meningkat menjadi 19, 634 pikul. Dengan terjadinya perang sipil di Aceh pada tahun 1815 impor lada turun secara tajam. Pada tahun 1818-1819 lada yang dikapalkan ke

[12] Ibid, hlm. 98-99

[13] John Anderson, *Mission to the East Coast of Sumatra in 1823* (Singapore: Oxford University Press, 1977) hlm. xvii

[14] *Op.cit*, Basset, hlm. 64

Penang dari Aceh hanya berjumlah 1,188 pikul tetapi dengan berakhirnya perang sipil perdagangan lada kembali meningkat kembali pada tahun 1821-1822 menjadi total 11,222 pikul.[15]

Inggris adalah importir utama lada dari Aceh hingga tahun 1820-an terutama untuk memenuhi kebutuhan pasar di Cina, India, dan Eropa. Inggris memiliki pangsa pasar yang besar dalam menguasai perdagangan lada, walaupun kondisi tersebut berubah setelah kedatangan kapal-kapal dagang dari Perancis dan Amerika untuk memuat lada dari Aceh. Jumlah yang diekspor ke Cina oleh para pedagang Eropa setiap tahunnya 20,560 pikul atau 2,741,333 lbs. Jika diangkut dengan kapal jung mungkin jumlahnya jauh lebih banyak atau sekitar 5,482,666. Belanda mengirim lada ke Jepang 30,000 lbs. setiap tahunnya. Jumlah lada dalam 11 tahun yang diimpor ke Benggala kira-kira 35,000 atau 21,000 pikul atau 2,800,000 lbs. seluruhnya hampir sama dengan impor dari Nusantara. Jumlah lada secara keseluruhan yang dikirim ke Eropa adalah 11,218,000 lbs. Kepulauan Hindia terutama, walaupun tidak seluruhnya, di suplai dengan produksi dari Malabar, dan juga wilayah-wilayah di Persia dan teluk Arab. Wilayah-wilayah yang terletak antara Siam dan Cina disuplai dengan produk mereka sendiri, yang hal tersebut tidak mungkin diperkirakan jumlahnya.[16] Eropa adalah konsumen lada terbesar dibandingkan dengan India atapun Cina.

Pertanian lada mulai berkembang dengan pesat menjelang tahun-tahun terakhir abad ke-18 di wilayah-wilayah bawahan paling selatan Kesultanan Aceh di pantai barat Sumatra. Pada tahun 1820, wilayah ini menghasilkan sekitar separuh dari pasokan lada dunia. Kapal-kapal New England mengambil bagian terbesar mengambil bagian terbesar dalam perdagangan lada, tetapi kapal-kapal Arab, India Penang (Inggris dan Cina) dan Prancis semua terlibat dalam aktifitas perdagangan tersebut pada tahun 1820-an. Pada tahun 1823 empat kapal besar Prancis dilaporkan memuat lada dari pantai tersebut dibandingkan dengan 27 kapal Amerika. Dua puluh tahun kemudian Prancis dianggap menduduki tempat ketiga dibawah Amerika dan Inggris. Sembilan atau sepuluh kapal Prancis singgah di Penang setiap tahun dan sebagian besar dari kapal-kapal ini berlayar ke Aceh untuk memuat lada.[17] Pedagang-pedagang Amerika adalah saingan terberat bagi perusahaan dagang Inggris (EIC) dalam perdagangan lada, bukan saja dalam pembelian lada tetapi juga ekspor mereka ke pasaran Eropa. Inggris memperkirakan bahwa Amerika akan mensuplai lada ke Eropa dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga yang ditawarkan oleh Inggris atau Belada, karena kapal-kapal Amerika tidak memiliki pos dagang ataupun markas baik di Sumatra ataupun India, sehingga meminimalisir biaya operasional.[18] Kekhawatiran Inggris bahwa Amerika akan mendirikan pos dagang yang permanen di perairan

---

[15] T. Puvanarajah dan R. Suntharalingan, *The Acheh Treaty 1819* (Journal of Southeast Asian History Vol. 2, No. 3, October 1961, Cambridge University Press on behalf of Departement of History National University of Singapore) hlm. 36

[16] Crawfurd (1820), hlm. 369

[17] Anthony Reid, *Menuju Sejarah Sumatra Antara Indonesia dan* Dunia (Jakarta: KITLV, Yayasan Obor Indonesia, 2011) hlm. 161

[18] Lee Kam Hing (1995), hlm. 104

Sumatra, semakin memuncak ketika seluruh kapal Amerika yang terdiri dari pedagang-pedagang mandiri mendarat di Labuhan Haji yang menghasilkan lada dengan kualitas terbaik. Kapal dagang Amerika bernama *Crescent* juga mendarat di Meuke pada September 1803, selanjutnya delapan kapal Amerika di penuhi dengan muatan lada dari pelabuhan tersebut selama musim lada yang dibayar dengan dolar. Meuke telah mengirim 1.500 pikul lada pertahunnya selama lima tahun untuk kargo Amerika bernama *Crescent* yang cukup untuk menutup biaya selama ekspedisi. jumlah tersebut senilai sekitar 75.000 dolar Spanyol.[19]

Salah satu cara yang paling efektif bagi Kompeni Inggris untuk menyaingi perdagangan lada dengan Amerika adalah mengadakan perjanjian dengan Lebai Dappah yang menguasai pusat-pusat penghasil lada di Susoh dan Singkil. Kompeni Inggris akan membeli seluruh lada yang diproduksi di Susoh dengan harga yang disepakati oleh Lebai Dappah dengan syarat tidak menjualnya kepada Amerika.[20] Dengan dikuasainya Susoh dan Singkil sebagai dua pelabuhan lada terbesar di pantai tersebut akan mengurangi pembelian lada dalam jumlah besar oleh Amerika yang akan dijual ke Eropa, ditambah lagi biasanya kapal-kapal akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkan lada sebelum kembali ke perjalanannya semula.

Pantai-pantai di selatan Aceh yaitu pantai yang terletak antara Susoh dan Trumon hingga tahun 1803 menghasilkan sekitar 5.000 ton lada dan sebagian besar dikirim ke New England sehingga Amerika menjadi penyedia utama lada bagi Eropa.[21] Pada tahun 1820-an Aceh jauh mengungguli produksinya pada abad ke-16 dan menghasilkan lebih dari separuh hasil lada dunia. Menurut perkiraan Penang mengenai produksi pada periode ini, nilai ekspor Aceh mencapai sekitar 1.900.000 dolar Spanyol. Dari jumlah $400.000 dibawa ke Penang dengan kapal-kapal kecil Asia; senilai $1.000.000 diangkut oleh pedagang Amerika dari wilayah lada pantai barat dan sisanya diangkut oleh kapal-kapal India, Perancis dan Arab. Produksi lada mencapai puncaknya di atas 230.000 pikul pada tahun 1820, dan ini lebih besar dari daya serap pasar dunia.[22] Amerika menguasai lebih dari separuh total produksi lada yang dihasilkan Aceh dan wilayah-wilayah kekuasaannya.

Perseteruan antara Inggris dan Belanda berakhir dengan negosiasi alot dalam Traktat London 1824. Dengan traktat antara Inggris Raya dan Belanda yang dilakukan di London pada tanggal 17 Maret 1824, seluruh wilayah kekuasaan Inggris di Sumatra diserahkan kepada Belanda dari tanggal 1 Maret 1825, dan sebaliknya Belanda menyerahkan wilayah jajahannya di anak benua India dan Malaka di semenanjung Malaya. Sejak ditandatanganinya Traktat London, aktiitas perdagangan Inggris menjadi terbatas di wilayah-wilayah penghasil lada di Sumatra. Sejumlah wilayah kecil Deli dan Langkat, dan lebih penting lagi Siak tidak

19 *Ibid*, hlm. 104-108

20 *Ibid*

21 Reid (2010), hlm. 284

22 Anthony Reid, *Asal Mula Konflik Aceh dari Perebutan Pantai Timur Sumatra hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005) hlm. 15

dapat mempertahankan intervensi kekuatan dari Belanda yang mengancam masa depan perdagangan Inggris sebagaimana yang terjadi dengan Aceh. Pembentukan wilayah jajahan di sepanjang pantai tersebut, dan penetapan pajak sebagaimana yang telah disebutkan diatas menurut Traktat 1824 akan mempersulit dan bahkan mengakhiri perdagangan dengan seluruh wilayah-wilayah tersebut..

Kebijakan pemerintah Inggris di Selat Malaka yang menentang kontrol Belanda di Sumatra sangat beralasan, terutama berhubungan dengan pengaruh terhadap perdagangan antara Penang dan Sumatra. Sejak meluasnya kontrol Belanda atas Sumatra, perdagangan dengan entrepot Penang hanya terbatas pada wilayah-wilayah pantai barat Aceh dan sebagian pantai sirih Pidie di pantai timur. Wilayah-wilayah penghasil lada di Aceh dan wilayah-wilayah kekuasaannya sebagian telah dikuasai Belanda. Pantai barat Aceh sepanjang Trumun sejak tahun 1824 telah memproduksi 150.000 pikul lada dan pantai timur di sepanjang Deli memproduksi sekitar 18,000 lada. Kepentingan perdagangan Inggris juga sudah terganggu dengan kehadiran pedagang-pedagang Perancis dan Penang yang melakukan perdagangan langsung dengan pelabuhan-pelabuhan milik penduduk di pantai barat Aceh, dimana sebelumnya perdagangan langsung antara India dan Aceh telah dilakukan di pelabuhan-pelabuhan tersebut oleh para pedagang dari Malabar dan Koromandel.[23] Posisi Penang sebagai entrepot dagang menjadi semakin rapuh ketika pada tahun 1843 para pedagang memutuskan untuk tidak membayar pajak di Penang sebagaimana yang telah dilakukan oleh para pedagang dari Perancis dan Amerika.

Kondisi politik yang ditimbulkan oleh perebutan monopoli perdagangan antara Inggris, Amerika, dan Belanda tidak banyak mempengaruhi perdagangan lada di Aceh memasuki paruh kedua abad ke-19. Perkembangan perdagangan lada lebih ditentukan oleh faktor mekanisme pasar yang sulit diprediksi. Stabilitas politik dalam negeri dibawah Sultan Ali Alauddin Manshur Shah justru mendorong perkembangan ekonomi dan perdagangan di Aceh menjelang paruh kedua abad 19. Produksi lada di Aceh turun naik mengikuti pergerakan harga yang tidak stabil di Eropa. Produksi rata-rata pada periode 1830-1870 sekitar 150.000 pikul pertahun dengan harga hampir $6 perpikul. Tanah yang sudah hampir tidak produktif lagi dan daya tarik Penang sebagai pasar yang ramai memicu dua pergeseran penting di pusat produksi lada Aceh selama periode tersebut. Sekitar tahun 1830 perimbangan wilayah penghasil lada bergeser dari pantai lama di selatan Meulaboh milik Lebai Dappah ke pusat-pusat baru di sebelah utara – Porte, Rigas, Teunom dan Meulaboh. Pada tahun 1850-an sebuah wilayah ketiga mekar di ujung timur laut Sumatra, antara Lhokseumawe hingga Tamiang. Pekerja-pekerja musiman atau mereka yang menetap di kebun-kebun lada baru tersebut terdiri dari penduduk di Aceh Besar atau Pidie. Para perintis terkemuka di daerah-daerah baru ini, sebagian besar para *uleebalang* Aceh Besar sebagai penguasa bebas di tepi-tepi sungai daerah baru tersebut.[24] Para uleebalang selain memperoleh pendapatan dari pajak produksi lada, sebagian merupakan

[23] *Ibid*, hlm. 131-132

[24] Reid (2005), hlm. 15-16

pemilik perkebunan lada di Aceh. Sejak tahun 1850, Aceh masih menjadi pemasok tunggal terbesar kebutuhan lada dunia dengan munculnya kebun-kebun baru hingga ke pantai utara Meulaboh dan pada dekade berikutnya disusul dengan perkembangan wilayah penghasil lada baru di pantai utara di sekitar Aceh yaitu Langsa dan Idi.[25] Dua produsen lada utama pada distrik yang terletak di Simpang Ulim dan Idi Rayeuk masing-masing mengekspor lada senilai 4.600.000 pound (35.000 pikul) pertahun. Pada waktu yang bersamaan dengan Julok Rayeuk, Peureulak dan Peudawa Rayeuk memproduksi 13.300.000 pound (100.000 pikul) pertahun.[26] Aktifitas perdagangan lada di Aceh memasuki babak baru yang menunjukkan peningkatan pesat meskipun harga pada tahun 1850 turun sebanyak $4 - $5 dari harga pada awal abad ke-19 ketika seorang pedagang Amerika membeli lada di Meuke dengan harga $10 - $11 perpikul tahun 1803. Hukum permintaan dan penawaran terhadap komoditas ekspor yang berlaku dalam mekanisme pasar sangat mempengaruhi perubahan harga selama kurun waktu 50 tahun tersebut.

Produksi lada rata-rata di pantai-pantai Aceh pada periode 1830-1870 sekitar 150.000 pikul pertahun. Peningkatan produksi ini jauh lebih besar dibandingkan dengan produksi yang dihasilkan Aceh dan pantai barat Sumatra antara tahun 1814-1823 dengan total jumlah 98.016 pikul dan produksi rata-rata pertahun pada periode tersebut adalah 10,89 pikul. Permintaan pasaran dunia yang semakin besar terhadap komoditas lada memacu pertumbuhan wilayah-wilayah baru pembudidayaan lada di Aceh untuk memenuhi kebutuhan pasar.

2. Proses Kemunduran Perdagangan Lada di Aceh Memasuki Penghujung Abad 19

Aceh mengalami masa-masa yang paling menengangkan setelah ekspansi pemerintah Hindia Belanda pada penghujung abad ke-19. Perjanjian Sumatera 1871 semakin meruncingkan hubungan antara Aceh, Inggris, dan Belanda hingga memunculkan konflik berkepanjangan antara Aceh dan Belanda. Traktat Sumatra atau Perjanjian Sumatra tahun 1871 merupakan suatu upaya yang dibuat untuk menengahi persengketaan wilayah antara Inggris dan Belanda yang belum terselesaikan sejak Traktat London tahun 1824, walaupun bagi Aceh, Perjanjian Sumatra justru menimbulkan sebuah masalah baru. Traktat London tahun 1824 yang mengakui kedaulatan Aceh, digantikan dengan Perjanjian Sumatera tahun 1871. Bagi Belanda, Aceh adalah wilayah yang memiliki nilai politik strategis di Sumatera dan kepulauan Nusantara.

Ketegangan antara Aceh dan Belanda mencapai puncaknya, terutama sepanjang tahun 1870-1874 dengan perang dan blokade militer Belanda. Perang Aceh terjadi dalam periode panjang, yang terbagi menjadi beberapa fase yang melelahkan. Pada wilayah-wilayah bawahan di sepanjang pantai yang hidup dari perdagangan, kedudukan Belanda lebih kokoh. Belanda menerapkan blokade

[25] Reid (1995), hlm. 100

[26] Lee Kam Hing, *Aceh at the Time of the 1824 London Treaty* dalam *The Hisstorical Background of the Aceh Problem*, International Conference Asia Research Institute National University of Singapore 28-29 May 2004 (Singapore: National University of Singapore, 2004) hlm. 8

perdagangan terhadap sejumlah wilayah-wilayah strategis di Aceh. Perang dan blokade yang terjadi di Aceh membawa kerugian besar bagi prospek perdagangan Inggris. Perang dan blokade menyebabkan prospek perdagangan antara Aceh dan Penang menjadi kurang menguntungkan karena terhambatnya aliran modal. Meskipun demikian, kurun masa selama perang dan blockade tersebut di sisi lain juga membawa keuntungan bagi pedagang-pedagang besar yang menguasai pasaran lada di Penang. Pada tanggal 25 Juli 1874 blokade terhadap seluruh wilayah bagian selatan mulai diaktifkan. Wilayah bagian selatan di bawah kekuasaan Said Saleh dan wilayah Sungai Raya dibawah kekuasaan Said Akil dipisahkan dan diberi hak khusus. Blockade meliputi seluruh wilayah darat dan laut Aceh, antara Pedawa Besar, Perlak, dan Alur Sembilan, antara Sungai Raya, Sungai Bayeun, dan Sungai Nipah, antara Sungai Hiu, Telaga Meukeu, dan Kuala Genting.[27] Pemerintah Hindia Belanda dalam kaitannya dengan hubungan perdagangan ke Penang, memiliki konsul atau perwakilan yang bertugas membatasi keluarnya lisensi atau surat ijin perseorangan yang akan memasuki wilayah Aceh. Kebijakan ini tentu saja menuai protes keras bagi para pedagang di Penang dimana sebagian besar terdiri dari pedagang-pedagang Cina dan Inggris yang sebelumnya telah membayar uang muka untuk membeli lada dari orang-orang Aceh. Kepala-kepala adat Aceh dan para pedagang (baik perkumpulan atau perseorangan) selalu memberikan hutang kepada para petani lada di Aceh untuk menanam lada dan setelah masa panen tiba, hasilnya dijual kepada para pedagang tersebut. Kebiasaan memberikan uang muka sebagai jaminan untuk pembelian lada hingga tiba masa panen berikutnya, biasanya dilakukan oleh para pedagang dari Cina yang berada di Penang. Pelunasan hutang, dibayar dengan sejumlah produksi lada pada tahun berikutnya yang dilakukan atas dasar perjanjian kesepakatan antara kedua belah pihak, baik petani lada maupun pedagang. Kesepakatan ini selalu memberikan keuntungan bagi para pedagang Cina, dimana para pemberi hutang/ uang jaminan tersebut memberikan uang muka sebesar 1000 dollar secara terus-menerus. Pada bulan Agustus 1873, "lisensi" pertama diberlakukan bagi kapal-kapal yang memasuki pantai timur Aceh. Para pedagang dari Penang juga wajib membuat surat pengakuan hutang.[28] Pada saat Aceh di blockade, para pedagang yang telah memberikan uang jaminan kepada petani lada terancam resiko kerugian. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan berlakunya surat ijin yang harus diurus kepada konsul Belanda di Penang. Peraturan tersebut membatasi aktifitas para pedagang Penang yang selama ini banyak melakukan aktifitas perdagangan di Aceh.

Kontrol kuat dengan pembatasan visa bagi kapal-kapal yang memasuki perairan Aceh, dilakukan dengan dalih pengamanan wilayah, karena semasa masa perang dan blockade banyak kapal-kapal yang dicurigai menyelundupkan barang-barang dagangan. Protes dari para pedagang Penang terhadap kebijakan Belanda di Aceh menyebabkan perubahan penting yaitu antara tanggal 22 Juli dan 23 September 1873, sistem surat ijin itu

[27] J.A. Kruijt, *Atjeh en Atjehers Twee Jaren Blokkade op Sumatra's Noord – Oost – Kust* (Leiden: Gualth Kolf, 1877), hlm. 47

[28] *Ibid,* hlm. 55

berjalan lancar dan dalam jangka waktu itu telah dikeluarkan 61 surat izin di Penang. 17 kapal diijinkan memuat lada dan pinang sebagai pengganti tanda jadi yang diberikan, sedangkan sisanya hanya diijinkan menagih hutang saja. Para pedagang bersangkutan tidak puas, dan mereka tidak henti-hentinya menuntut hak agar membawa mata uang ke Aceh untuk membayar harga lada yang terutang karena tanpa pembayaran ini, tidak ada dorongan bagi orang Aceh untuk menyerahkan lada, bahkan lada yang sudah diberikan tanda jadi sekalipun. Berkat protes dan tuntutan mereka, para pedagang Penang berhasil membawa lada senilai 1,5 juta dollar keluar Aceh pada tahun 1873 atau sekitar dua pertiga hasil panen total. Pada bulan September, laporan-laporan dari Penang dan dari armada yang melaksanakan blockade menunjukkan bahwa surat ijin disalahgunakan untuk membawa keluar lada yang tidak diberi tanda jadi. Sistem surat ijin kemudian dihapus pada tanggal 23 September 1873.

Perang dan blockade tidak lagi dianggap sebagai cara yang efektif untuk menerapkan kontrol perdagangan atas wilayah-wilayah pantai di Aceh. Mulai April tahun 1880 pemerintah Hindia Belanda menerapkan peraturan yang disebut *scheepvaartregeling* (peraturan pelayaran).[29] Van der Heijden mengeluarkan perintah bahwa untuk sementara waktu semua perdagangan luar negeri yang semula diarahkan ke Uluee Lhue, dibatasi hanya pada empat atau lima pelabuhan saja dibawah kontrol Belanda. Pada bulan Mei-Agustus tahun 1882 Van der Hoeve menutup seluruh pelabuhan di Pantai Utara. Kapal-kapal dari luar Aceh hanya diijinkan singgah di empat pelabuhan Belanda: Uluee Lhuee, Sigli, Samalanga, dan Lhokseumawe.[30] Penutupan pelabuhan Pantai Utara adalah sebuah tindakan yang bermuatan politik, karena wilayah Pantai Utara semula merupakan pusat perdagangan yang banyak dilalui kapal-kapal besar, baik dari Penang maupun Singapura.

Perang antara Belanda dan Aceh disisi lain menjadikan arus impor barang dari Penang semakin lancar, akan tetapi arus ekspor terutama untuk lada dan pinang banyak mengalami hambatan sekalipun harga kebutuhan pangan cenderung stabil. Di Kutaraja yang merupakan pusat pemerintahan Aceh, situasi pasar pada bulan Januari dan April tahun 1897 cenderung stabil. Harga daging, ternak, telur, ikan laut, minyak tanah, kelapa, sayur, dan buah-buahan cenderung stabil. Harga lada sedikit mengalami kenaikan, dimana pada bulan Januari harganya 6 gulden per cangkir sementara pada bulan April menjadi 10 gulden per cangkir.[31] Situasi pasar di Kutaraja selama konflik Aceh dan Hindia Belanda menunjukkan bahwa perang dan blockade tidak terlalu banyak mempengaruhi aktifitas ekonomi penduduk.

Pada awalnya para petani lada dari Aceh Besar dan Pidie adalah penduduk yang sejahtera, akan tetapi lambat laun, terutama sejak meletusnya Perang Aceh, kondisi mereka mulai berubah. Para penduduk dari Aceh Besar banyak

---

29 *Ibid*, hlm. 224

30 *Ibid*, hlm. 227

31 ANRI, *Perlawanan Tokoh-tokoh Masyarakat Aceh terhadap Rezim Kolonial Belanda*, (Proyek Pemasyarakatan dan Desiminasi Kearsipan Nasional Arsip Nasional Republik Indonesia, 2002) hlm. 40

berpindah dari Pantai Barat ke Pantai Timur. Kepemilikan kebun lada biasanya dikuasai oleh perseorangan yang memiliki modal besar, karena sekaligus menguasai aktifitas pelayaran.[32] Komunitas penduduk pada sebuah *gampong* (kampong) yang tergabung dalam sebuah sistem pertanian lada disebut *seunabok*, dimana masing-masing *seunabok* diawasi oleh seorang kepala wilayah. Pada saat musim panen tiba, penduduk yang terdiri dari sekelompok besar wanita bekerja di kebun lada dimana setiap kebun terdiri dari 1000 jiwa yang dinamakan *seunaboek*.[33] Penanaman berkembang luas terutama disebabkan oleh kedatangan para migran dari berbagai wilayah di Aceh. pada tahun 1873, menurut perkiraan penduduk Aceh yang menanam lada sebanyak 100.000 jiwa dengan produksi lada sebesar 10.000 pikul pertahunnya.[34] Wilayah-wilayah penghasil lada memasuki penghujung abad 19, meliputi Aceh bagian Timur, terutama Simpang Ulim, Idi, Julok, Pedawa, dan Perlak. Produsen lada terbesar hingga tahun 1873, terutama dihasilkan oleh Simpang Ulim dan Idi dimana masing-masing menghasilkan produksi lada rata-rata 35.000 pikul per tahun. Sementara itu, Julok, Perlak, dan Pedawa rata-rata memproduksi 10.000 pikul lada pertahunnya. Wilayah-wilayah lain hanya memproduksi lada dalam jumlah kecil yaitu 1000 hingga 2000 pikul pertahun.[35] Perkembangan produksi dan perdagangan lada di Aceh memasuki abad 19 berpindah dari wilayah-wilayah di sepanjang pantai barat ke wilayah-wilayah di pantai timur Aceh.

Wilayah-wilayah di pantai timur Aceh berkembang menjadi pusat produksi dan perdagangan lada memasuki penghujung abad 19. Wilayah-wilayah antara Diamond-Point (Tanjung Jambu Air) dan Tamiang yang memiliki tanah subur serta jarak yang dekat dengan Penang mengalahkan pantai barat Sumatera dalam produksi lada pada tahun 1860-an. Wilayah-wilayah tersebut mendatangkan keuntungan yang cepat dalam waktu cepat. Pemimpin-pemimpin di wilayah-wilayah pengekspor lada seperti Simpang Ulim dan Idi saling bersaing secara politik dalam memperebutkan pasaran lada di Penang.[36] Idi dan Tamiang menjadi wilayah utama di Pantai Timur Aceh yang berperan sebagai produsen sekaligus distributor lada terbesar pada masa Pemerintah Hindia Belanda.

Produksi lada dari Idi seagian besar dikirim ke Penang untuk kemudian di bawa ke Eropa. Kapal-kapal uap di sepanjang pantai utara Aceh berlayar melewati Idi untuk memuat lada. Sebagian lada dari wilayah bagian barat Sumatera masih melakukan aktifitas perdagangan dengan Penang dalam jumlah besar. Aktivitas pelayaran dan perdagangan dari

---

32 J.H. Heyl, *De Pepercultuur in Atjeh en Onderhorigheden* (Koeta Radja: Atjeh Drukkerij en Boekhandel, tanpa tahun) hlm. 4-5

33 P.B. Brijn van Rozenburg, *Met Sie Anoe naar Edi Een Bescheiden Bijdrage tot de kennis van een deel van Atjeh in zijn beteekenis voor Nederlands Handel, Nijverheid en Scheepvaart* (Apeldoorn: J.H. Steghgers H. Jzn, 1895) hlm. 62

34 Muhammad Gade Ismail, *The Economic Position of the Uleebalang in the Late Colonial State Aceh (East Aceh, 1900 – 1942)*, Netherlands Institute for Advanced Study, Wassenaar – Netherlands Conference, 12-14 June 1985

35 *Ibid*, hlm. 4

36 *Op.cit*, Reid (2005) hlm. 86

pusat-pusat produksi lada di bagian utara Sumatera dilakukan di pelabuahan Aceh untuk dikirim ke Penang. Menurut laporan dari Konsulat Jenderal di Penang tahun 1889 di sebutkan perolehan hasil ekspor dan impor sebagai berikut:[37]

	1888	1889
Impor dari Sumatera	5.153.793 dolar	3.431.392 dolar
Ekspor dari Idi	10.413.811 dolar	10.127.638 dolar
Jumlah total	15.567.604 dolar	13.559.030 dolar

Berdasarkan data tersebut, ekspor lada dari Idi ke Penang menunjukkan hasil yang besar dan relatif stabil setiap tahunnya. Hal tersebut tidak lepas dari dibebaskannya pelabuhan Idi dari blockade militer Belanda, sehingga kegiatan ekspor dan impor dapat berjalan lancar tanpa hambatan.

Tamiang merupakan wilayah di bagian timur Aceh yang menunjukkan perkembangan produksi dan perdagangan lada cukup signifikan selama masa perang dan blockade Belanda. Wilayah-wilayah sungai di Tamiang telah berkembang menjadi penghasil sejumlah komoditas ekspor yang aktif. Sejak sebagian wilayah-wilayah pantai bagian selatan Aceh mengalami penutupan karena kondisi perang yang berkecamuk, jumlah pajak ekspor lada di Tamiang menunjukkan peningkatan hingga mencapai wilayah bagian utara. Impor ke wilayah Tamiang jumlahnya pada tahun 1888 adalah 7.779 pikul, tahun 1889 senilai 7.352 pikul, dan tahun 1890 jumlahnya 17.664. Ekspor dan impor pada tujuh bulan pertama tahun 1891 adalah 6.320 pikul.[38] Pada tahun 1891, menurut laporan dari pemerintah di Aceh, hasil lada menunjukkan penurunan karena tidak memperoleh pinjaman hingga masa insinuasi. Pada masa Pemerintahan Gubernur Van Teijn, penyelundupan perdagangan lada dan perang yang berkecamuk turut mempengaruhi ekspor lada hingga mencapai jumlah yang sangat kecil. Kondisi perang merupakan faktor terbesar yang mempengaruhi penurunan ekspor lada di wilayah bagian utara yang menyulitkan penduduk Aceh untuk bertani.

Selama masa perang, blockade di segenap wilayah pantai Aceh diberlakukan dengan alasan keamanan. Selama kurun masa tersebut banyak terjadi praktek-praktek perdagangan gelap antara pelabuhan terbuka dan pelabuhan tertutup untuk menjamin bahwa sebagian besar panen lada dapat mencapai pasar. Aksi-aksi penyelundupan perdagangan lada dalam skala besar memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menjamin kestabilan ekspor lada terutama dari Aceh ke Penang. Sistem pemberian uang muka hingga tiba masa panen selanjutnya pada perdagangan lada, menjadikan para pedagang Cina dari Penang tidak mau rugi. Dengan demikian, jumlah ekspor komoditas lada di Aceh cenderung stabil dibandingkan ekspor pinang meskipun dalam kondisi perang dan blockade karena arus "perdagangan gelap" lada terus mengalir ke Penang. Pemerintah kolonial Belanda terus melakukan upaya pengamanan untuk memutus arus barang yang memasuki pelabuhan-pelabuhan di perairan Aceh

[37] Missive Gouvernements Secretaris No. 87, 14 April 1893, hlm 16, ANRI

[38] *Ibid.*

yang sudah diblokade selama perang berlangsung.

Pengelolaan kebun lada di Aceh sebelum ekspansi pemerintah kolonial Hindia-Belanda dikelola secara tradisional dengan memanfaatkan sistem kekerabatan. Sebuah kebun lada *(seunabok)* hak kepemilikannya adalah perseorangan dan diatur oleh pemilik yang bersangkutan. Penyerahan uang muka diserahkan kepada penggarap. Pengawasan disekitar kebun dilakukan oleh seorang kepala *(Peutoeha seunabok)* dan pembelanjaannya dilakukan oleh pemberi uang muka *(Petoeha pangkaj).* Uang muka tersebut bukan merupakan pungutan wajib melainkan perjanjian kerja yang dilakukan dengan perantara seorang peutoeha jaga, yang biasanya berbentuk mata uang, meskipun ada yang memberikan padi dan alat-alat pertanian. Hasil panen yang digarap oleh petani, tidaklah diserahkan kepada petani. Hasil produksi tersebut diserahkan sebagai hadiah kepada *Peutoeha seuneubok* dan *Peutoeha djaga (Wase Peutoeha)* atas keputusan dari *Uleebalang (Wase Uleebalang).* Penyerahan uang muka diatur menurut ketentuan produk yang terjual. Dalam hal ini *Aneuk seuneubok* (petani penggarap) hanya memperoleh jumlah yang sedikit.[39] *Mawaih plah tanoh* adalah prinsip dimana separuh dari hasil kebun lada menjadi hak pemillik, sementara para petani menerima hasil panen lada sebanyak 2 ½ pikul/1000 jumlah tanaman.[40] Dalam hal ini para *Peutoeha* dan *Uleebalang* memperoleh keuntungan maksimum dari hasil penjualan lada. Pada awalnya pedagang-pedagang Cina harus meminta ijin terlebih dahulu kepada kepala wilayah jika ada orang-orang Aceh yang hendak menjual lada dari kebunnya, dan ia berhak mendapat perlindungan setelah membayar pajak. Praktek tersebut kemudian berubah ketika banyak makelar-makelar Aceh yang menjadi perantara penjualan lada ke Penang. Sebelumnya, petani lada *(Aneuk Seuneubok)* tidak mendapat pinjaman uang dari para pedagang, mereka menyerahkan lada mereka kepada kepala kebun dan petani mendapatkan beberapa bagian pembayaran dari transaksi tersebut hingga masa selanjutnya. Kemudian, pedagang-pedagang Cina dan juga pedagang Aceh di seuneubok membeli lada secara langsung dari petani tanpa sepengetahuan dari para *peutoeha*.[41] Para pedagang Cina dari Penang memborong lada secara lagsung dari kebun. Dengan cara demikian, maka petani dapat memperoleh harga jual lada yang pantas terutama jika harga lada di pasaran sedang mengalami kenaikan tanpa harus menyerahkan hasil ladanya kepada *peutoeha seuneubok.* Para petani lada yang telah bersusah payah memelihara tanaman lada, hanya memperoleh bagian sedikit meskipun harga lada mengalami kenaikan di pasaran. Menurut hukum adat, para penguasa wilayah berhak menetapkan harga jual lada di pasaran, akibatnya nilai jual lada menjadi berkurang karena harganya yang tinggi. Pada dasarnya, pembelian langsung dengan sistem pemberian uang muka sebagaimana yang telah dilakukan oleh para pedagang Cina dari Penang, merupakan praktek monopoli perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang besar tanpa harus menanggung beban pajak dari *peutoeha seuneubok* menurut ketentuan adat.

---

39 J.J.C.H. Van Waardenburg, *De Invloed van den Landbouw of de zeden, de Taal en Letterkunde der Atjehers* (tanpa tahun dan tanpa penerbit) hlm.5

40 *Ibid*, hlm. 6

41 *Op.cit*, J.H. Heyl, hlm.42

Sistem pemberian uang muka dalam pembelian lada kepada petani lada di Aceh, merupakan merupakan cara yang lazim ditempuh oleh para pedagang Cina di Penang untuk meningkatkan produksi lada. Sistem kontrak jual beli lada tersebut, di sisi lain merugikan kepentingan perdagangan pemerintah Kolonial Hindia Belanda di Aceh. Kemunduran dalam pembudidayaan lada menurut Gubernur Van Dalen disebabkan oleh kurangnya modal perusahaan yang diberikan kepada pemilik kebun. Sistem tersebut dianggap banyak merugikan para petani lada, karena sebagian besar pembayaran uang muka diberikan kepada pemilik kebun dan kepala adat di setiap wilayah. Oleh karena itu pada masa pemerintahan Gubernur Swart sistem tersebut diganti menjadi penyerahan uang muka tanpa bunga dengan aturan pemberian kredit langsung.[42] Pemberian kredit langsung tersebut dikelola oleh Perusahaan Dagang Aceh milik Pemerintah Hindia Belanda dengan aturan-aturan sebagai berikut:[43]

Pasal 1 pemberian uang muka minimal 1000 dolar dan maksimal 2000 dolar setiap bulannya.

Pasal 2 penduduk yang diberi kredit langsung wajib mengangsur pelunasannya dari awal masa panen hingga periode masa panen selanjutnya selama satu tahun.

Pasal 3 jumlah cicilan kredit sebanyak 400 dolar setiap kali pembayaran.

Pasal 4 barangsiapa yang belum membayar angsuran pelunasan hingga tanggal 31 Desember setiap tahunnya akan dikenakan denda sebanyak 100 dolar.

Pasal 5 pembayaran denda dikurangi jumlah pajak tanpa persentase yang ditambahkan.

Pasal 6 pemungutan uang muka baru tidak boleh dilakukan tanpa seizin Pemerintah.

Pasal 7 produksi lada tidak diperkenankan dijual ke pasaran lain.

Peraturan-peraturan tersebut diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan tujuan untuk memonopoli komoditas perdagangan ekspor di Aceh, setelah politik blockade wilayah pantai tidak sepenuhnya berhasil. Sistem pemberian kredit langsung, merupakan sebuah cara untuk membatasi masuknya para pedagang Cina dari Penang yang sekaligus berperan sebagai pemborong lada di Aceh. Berdasarkan kesepakatan antara kepala *peutoeha* dan gabungan perusahaan dagang, *aneuk seuneubok*/ petani diijinkan untuk menerima uang muka dengan syarat-syarat/ pembatasan tertentu menurut adat pangkal.

Pemerintah kolonial Belanda, disamping melakukan monopoli perdagangan lada dengan menerapkan kebijakan sistem pemberian kredit langsung yang menggantikan sistem pemberian uang muka, juga menerapkan sejumlah kebijakan dalam sistem produksi dan perdagangan lada di Aceh, yaitu: penyeragaman satuan berat timbangan dalam *Pikul*, pemberlakuan mata uang Hindia Belanda, dan Uleebalang memperoleh pajak ekspor sebesar 10% atau *adat pangkal* sebesar 0.35 gulden, demikian juga dengan *adat peutoeha* berjumlah satu suku atau senilai 0.35

[42] Vide diens Nota d.d. 10 Agustus 1908, Nr. 2704/22)

[43] Ibid.

gulden/pikul lada [44] Sistem kredit menjadikan penjualan lada dapat dilakukan secara tercatat sesuai dengan hasil produksi petani. Sistem tersebut juga menciptakan hubungan ketergantungan antara petani dan perusahaan dagang dalam kegiatan ekspor. Perusahaan Dagang Aceh merupakan gabungan dari perusahaan dagang lada yang sekaligus berperan dalam mengontrol harga dasar lada dan mengirim komoditas tersebut dari tempat penjualan sesuai dengan harga pasaran di Penang setelah dikurangi biaya transportasi kapal sebesar 1 gulden hingga 2 gulden/pikul.

Persaingan yang tajam antara Perusahaan Perkapalan Belanda *(Koninklijke Pakervaart Maatschappij)* dan pedagang-pedagang Cina di Penang sering terjadi dalam aktifitas transportasi pelayaran. Kapal-kapal milik kongsi dagang Cina hampir selalu mengambil bagian terbesar dari kegiatan pengangkutan, sekaligus menjadi pemborong lada, pinang, dan komoditas lain dengan sistem pemberian uang muka. Persaingan dagang antara perusahaan dagang Belanda dengan kapal-kapal dagang milik Cina mendorong pemerintah Hindia Belanda menaikkan pemberian uang muka sebesar 50 % yang termasuk biaya pengangkutan dengan kapal. Harga muatan kapal-kapal dagang Cina yang diterapkan berdasarkan tariff kongsi dagang Cina pada mulanya lebih rendah dibandingkan dengan harga muatan perusahaan dagang Hindia-Belanda. Para pedagan kemudian berlomba-lomba untuk membuat biaya transportasi menjadi dua kali lipat lebih rendah. Harga muatan dihitung perpikul atau berlaku harga per 100 kg jumlah muatan.

Perdagangan lada di Aceh memasuki penghujung abad 19 semakin menunjukkan prospek buruk seiring dengan menurunnya permintaan pasar terhadap komoditas ekspor tersebut. Perubahan kecenderungan orientasi pasar tersebut pada dasarnya telah dimulai pada tahun 1875 pada saat beberapa investor modal asing dari Penang dan Singapura mencoba untuk membuka perkebunan tembakau di Idi, akan tetapi gagal karena kondisi tanah kurang mendukung. Usaha pembukaan perkebunan tembakau tersebut beralih ke Tamiang pada tahun 1898, namun kembali mengalami nasib yang serupa. Pembukaan perkebunan karet pada tahun 1907 dan dilanjutkan dengan perkebunan sawit pada tahun 1912 di wilayah bagian timur Aceh, menjadikan komoditas ekspor tersebut memiliki prospek yang jauh lebih menguntungkan dibandingkan komoditas lain.[45] Dari sinilah kemunduran perdagaangan lada dimulai secara besar-besaran dan tidak pernah bangkit kembali hingga 100 tahun kemudian.

Berikut ini diuraikan perkembangan perdagangan lada di Aceh di pasaran Penang sepanjang paruh kedua hingga paruh terakhir abad 19:

[44] J.H. Heyl, *De Pepercultuur in Atjeh en Onderhorigheden*, (Atjeh Drukkerij en Boekhandel Koeta Radja, tanpa tahun) hlm. 48-49

[45] *Op.cit*, Gade Ismail, hlm. 4

Perdagangan Penang dengan Aceh

Import dari Aceh						Ekspor ke Aceh
	LADA		**PINANG**		**PERKIRAAN HARGA TOTAL**	**BARANG ECERAN**
Tahun	Jumlah (pikul)	Harga Per pikul	Jumlah (pikul)	Harga Per pikul	($.000)	Jumlah Harga (buah)
1868	114.400[1]	$ 5.2	79.000[1]	$ 1.9		509.300[1]
1869	113.900[1]	6.8	93.700[1]	1.7		606.100[1]
1870	141.200[1]	8.2	84.700[1]	1.4	2.241	692.500[1]
1871	170.900[1]	13.5	82.800[1]	1.5	3.345	618.400[1]
1872	141.900[1]	1.6	50.400	2.5	2.906	507.900[1]
1873	105.700	13.5	42.500[1]	3.3	2.590	533.900[1]
	96.400	12.5	114.800	2.8	2.609	785.500
1874	164.400	10.1	69.300	2.2	3.229	628.500
1875	55.100	7.9	73.000		1.747	282.500
1876	155.600	7.2	63.500		1.762	281.700
1877	133.800	6.8	53.700		1.731	247.100
1878	95.900	7.8	74.600	5.5	1.876	209.800
1879	91.500	9.3	100.300	3.2	1.909	202.800
1880	107.100	11.2	69.800	2.8	1.500	210.000
1881	106.100	12.4	65.100		1.657	214.500
1882	122.300	14.7	94.800		2.820	215.200
1883	105.500	16.3	46.900		3.334	387.200
1884	122.300	18.5	38.600		3.543	419.000
	145.500	20.0	79.800		3.320	280.600
1885	134.900	20.6	62.300		3.952	311.600
1886	131.300	21.3	93.700	3.7	4.434	266.900
1887	140.400	15.0	65.500	4.2	3.223	171.200
1888	130.700	10.0	17.500	4.8		155.200
1889	159.500	9.8	35.600	3.7		191.400
1890	176.000	8.5	13.000	3.1		210.300
1891	157.500	8.6	63.700	3.1		176.900
1892	194.100	8.0	104.800	3.8		156.300
1893	131.400	8.5	85.300	3.4		306.500
1894	119.200	9.6	91.70	3.1		
1895	70.900[1]	14.5	95.700[1]	3.7		
1896	84.900[2]	23.0	147.600[1]	5.6		
1897	65.000	(ratarata)				

Sumber: Anthony Reid (2005)

Berdasarkan tabel tersebut, dari tahun 1873 pada saat blockade militer pertama kali dilakukan hingga tahun 1880 pada saat sejumlah penutupan sejumlah pelabuhan dagang diberlakukan, produksi lada cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan harganya sangat fluktuatif. Pada tahun 1880-1895, meskipun produksinya relatif stabil, akan tetapi harga pasarannya cenderung tidak stabil. Meskipun demikian hingga memasuki penghujung abad 19, pemerintah Hindia Belanda terus berupaya untuk memonopoli perdagangan lada di Aceh karena prospeknya masih menguntungkan dibandingkan dengan komoditas lain seperti pinang, yang terus mengalami kemerosotan drastis.

Kondisi tersebut semakin tidak menentu memasuki abad ke-20. Perdagangan lada di Aceh semakin menunjukkan bayangan buruk dibandingkan dengan periode sebelumnya, meskipun Aceh masih menghasilkan lada untuk kedepannya. Permintaan pasar yang semakin menurun terhadap komoditas tersebut menjadikan prospek perdagangan lada di Aceh harus tunduk pada hukum permintaan dan penawaran menurut sistem mekanisme pasar global.

V. KESIMPULAN

Sejarah perdagangan lada di Aceh abad 19 mengalami fase panjang dari tahap perkembangannya secara pesat pada paruh pertama abad 19. Selama kurun waktu tersebut, wilayah Aceh memasok hampir separuh dari kebutuhan lada dunia. Perkembangan pusat-pusat penghasil lada bermekaran di sepanjang pantai timur dan pantai utara Aceh. Jaringan perdagangan lada semakin luas dengan Inggris yang memiliki pasaran di Cina dan Eropa, serta kedatangan kapal-kapal dagang dari Amerika dan Perancis. Pola perdagangannya terus mengalami perubahan dari abad ke abad menyesuaikan dengan kompleksitas jaringan perdagangannya.Perubahan orientasi pasar dunia terhadap lada yang diikuti dengan fluktuasi harga memainkan peranan penting yang sangat mempengaruhi kemunduran perdagangan lada di Aceh memasuki penghujung abad 19, disamping ketidakstabilan kondisi sosial-politik dalam negeri sejak ekspansi Belanda. Mekanisme pasar berdasarkan hukum permintaan dan penawaran terhadap suatu komoditas perdagangan merupakan faktor utama yang menentukan perkembangan dan kemunduran perdagangan lada di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

A Brief Account of the Several Countries Surrounding Prince of Wales's Island with their Production Reed from Captain Leight: Enclosed Lord Cornwallis's letter to Mr. Dundas 7th January 1789 (Journal of Malayan Branch Royal Asiatic Society, Vol. 16, No. 1, July 1938)

Anderson, John, *Mission to the East Coast of Sumatra in 1823* (Singapore: Oxford University Press, 1977)

Anderson, John, *Acheen and The Ports on the North and East Coast of Sumatra with Incidental Notices Trade in the Eastern Seas and the Aggression of the Dutch*, (London: W.M. H. Allen and CO, Leadenhall Street, 1840)

ANRI, Missive Gouvernements Secretaris No. 87, 14 April 1893

ANRI, *Perlawanan Tokoh-tokoh Masyarakat Aceh terhadap Rezim Kolonial Belanda*, (Proyek Pemasyarakatan dan Desiminasi Kearsipan Nasional Arsip Nasional Republik Indonesia, 2002)

Brijn van Rozenburg, P.B., *Met Sie Anoe naar Edi Een Bescheiden Bijdrage tot de kennis van een deel van Atjeh in zijn beteekenis voor Nederlands Handel, Nijverheid en Scheepvaart* (Apeldoorn: J.H. Steghgers H. Jzn, 1895)

Crawfurd, John, *History of the Indian Archipelago Vol III* (London: Printed for Archibald Constable aand Co. Edindburg and Hurst, Robinson, and Co. Cheapside, 1820)

Gade Ismail, Muhammad, *The Economic Position of the Uleebalang in the Late Colonial State Aceh (East Aceh, 1900 – 1942)*, Netherlands Institute for Advanced Study, Wassenaar – Netherlands Conference, 12-14 June 1985

Garaghan S, Gilbert J., *A Guide to Historical Method*, (New York: Fordham University Press, 1957)

Hockett, Homer Carrey *The Critical Method in Historical Research and Writing* (New York: The Mac Millan Company, 1967)

Heyl, J.H., *De Pepercultuur in Atjeh en Onderhorigheden* (Koeta Radja: Atjeh Drukkerij en Boekhandel, tanpa tahun)

Kam Hing, Lee, *The Sultanate of Aceh Relationship with the British 1760-1824* (Thesis). (Kuala Lumpur: Oxford University Press, Singapore, Oxford, New York. KITLV, 1995)

Kartodirjo, Sartono, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif* (Jakarta: PT Gramedia, 1982)

Kruijt, J.A., *Atjeh en Atjehers Twee Jaren Blokkade op Sumatra's Noord – Oost – Kust* (Leiden: Gualth Kolf, 1877)

Puvanarajah, T., Suntharalingan, R., *The Acheh Treaty 1819* (Journal of Southeast Asian History Vol. 2, No. 3, October 1961, Cambridge University Press on behalf of Departement of History National University of Singapore)

Reid, Anthony, *Humans and Forest in Pre-Colonial Southeast Asia* (Environment and History Vol. I No. I, February 1995, Published by: White Horse Press)

Reid, Anthony, *Menuju Sejarah Sumatra Antara Indonesia dan* Dunia (Jakarta: KITLV, Yayasan Obor Indonesia, 2011)

Reid, Anthony, *Asal Mula Konflik Aceh dari Perebutan Pantai Timur Sumatra hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005)

The Historical Background of the Aceh Problem, International Conference Asia Research Institute National University of Singapore 28-29 May 2004 (Singapore: National University of Singapore, 2004)

Van Waardenburg, J.J.C.H. *De Invloed van den Landbouw of de zeden, de Taal en Letterkunde der Atjehers* (Batavia: Gedrukt Bij N.V. Dubbeldeman's Boekhandel, 1936)

Vide diens Nota d.d. 10 Agustus 1908, Nr. 2704/22)